Stateless Society, Ironi Metropolis

Jawa Pos, Selasa, 5 Januari 2009

Oleh: Akh Muzakki

SEKITAR 1.360 kepala keluarga (KK) warga Bendul Merisi Jaya terancam menjadi penduduk liar. Sejak empat tahun lalu, pemkot tak mengakui warga yang tinggal di RW XII (Metropolis, 1 Januari 2010) tersebut. Laporan itu menunjuk banyaknya anggota masyarakat di Bendul Merisi yang secara birokrasi kependudukan dianggap penduduk liar.

Dari sisi anggitan, penduduk liar" dalam konteks tersebut dalam kajian politik kependudukan dan atau kewarganegaraan disebut masyarakat tanpa kewarganegaraan (stateless society). Masyarakat yang demikian kehilangan hak-hak dasar yang semestinya dimiliki layaknya warga negara lainnya. Mulai dari hak layanan kependudukan hingga hak politik.

Kasus warga Bendul Merisi tersebut mengingatkan kita pada kasus serupa yang terungkap pada 2006. Saat itu, dimotori Jaringan Islam Anti-Diskriminasi (JIAD), terekspos ke publik bahwa tak kurang dari 30 warga metropolis hidup tanpa status kewarganegaraan. Kebetulan, saat itu mereka yang termasuk kategori stateless society berasal dari kalangan etnis Tionghoa.

Saat itu pula selanjutnya diselenggarakanlah bahtsul masail (forum pembahasan isu-isu strategis) oleh PW NU Jawa Timur. Diinisiasi oleh JIAD, forum yang dihadiri 15 kiai ternama Jawa Timur tersebut memfatwakan haram atas diskriminasi layanan kependudukan, termasuk terhadap stateless society.

Hak Kewarganegaraan

Dari perspektif etnisitas, kasus stateless society yang kini ramai mewarnai dinamika sosial kependudukan Surabaya berbeda dari kasus serupa pada 2006. Jika pada 2006 korban yang terekspos adalah kaum minoritas etnis Tionghoa yang kebetulan mengalami kemalangan dari sisi ekonomi, kini korbannya adalah warga etnis Jawa.

Dari perspektif sosial pun, dua kasus tersebut berbeda latar belakang. Pada 2006, kasus stateless society dilatarbelakangi pengesahan UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Dalam praktiknya, UU tersebut belum mampu menghapus praktik diskriminasi atas layanan birokrasi kependudukan, terutama terhadap sejumlah kalangan minoritas Tionghoa.

Kasus stateless society saat ini justru berawal dari status tanah yang ditempati para warga Bendul Merisi. Sebagaimana diberitakan Metropolis (1/1/2010), tanah seluas 11,4 hektare itu masih menjadi sengketa antara perusahaan minyak negara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah perusahaan pengembang. Kecamatan Wonocolo menilai warga menempati tanah yang tak jelas statusnya.

Terlepas dari perbedaan latar belakang dan konteks persoalan yang mengitari, problem stateless society jelas menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat korban. Hal pertama yang muncul, warga tak memiliki KTP/KSK sebagai anggota warga setempat. Meski sudah puluhan tahun menempati wilayah itu, mereka tetap dianggap sebagai penduduk liar yang tak berhak atas kepemilikam KTP/KSK.

Akibat lanjutan pun tak terhindarkan. Mereka yang termasuk stateless society itu tidak akan bisa mengurus kepemilikan akta kelahiran. Anak-anak yang lahir dari anggota masyarakat tersebut hidup tanpa status kependudukan yang jelas.

Kaum stateless society juga tak akan bisa membuat surat nikah sebagai bagian dari proses pencatatan pernikahan mereka. Ujungnya, mereka pun secara administratif negara dianggap pasangan ilegal dalam perkawinan.

Selain itu, mereka tak akan bisa berurusan dengan pihak bank. Kepentingan untuk bisa membuka rekening tak akan terealisasi sama sekali karena tidak punya bukti kependudukan. Kepentingan mereka dalam hal ini runtuh dengan sendiri.

Karena rata-rata yang tergolong stateless society tersebut adalah kaum miskin, mereka pun tak akan bisa menikmati hak-haknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Sebab, program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang disediakan untuk warga miskin tak akan bisa diakses. Penyebabnya jelas, mereka tak didukung bukti-bukti kependudukan seperti KTP/KSK.

Intinya, tidak ada ruang publik yang tersisa bagi kaum stateless society. Jangankan hak politik untuk menjatuhkan pilihan pada kesempatan pemilu, jiwa-kehidupan yang menjadi satu-satunya kepemilikan dasar mereka tak dijamin negara.

Kalau sudah begitu, betul pula anekdot berikut. Lebih enak menjadi kucing di negara maju daripada menjadi manusia di negara berkembang. Sebab, hak-hak kucing lebih bisa dijamin di negeri-negeri maju daripada hak-hak dasar manusia di negara berkembang. Kasus stateless society di kota metropolis ini menjadi salah satu bukti penguat anekdot tersebut.

***

Kasus stateless society itu sungguh merupakan ironi bagi Surabaya yang telanjur menahbiskan diri sebagai kota metropolis. Anggitan metropolis sejatinya tidak saja melampaui problem-problem persamaan hak-hak sipil kependudukan-kewarganegaraan, tapi sudah seharusnya memikirkan penyemaian peradaban kosmopolit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sungguh ironis jika Surabaya masih harus terus berkutat pada persoalan kependudukan-kewarganegaraan. Karena itu, bukan hanya pihak eksekutif dan legislatif yang harus cepat dan tanggap menyelesaikan persoalan stateless society. Simpul-simpul masyarakat juga harus begerak dalam tarikan napas yang sama untuk secara aktif terlibat dalam menyelesaikan kasus ini.

Ormas-ormas keagamaan sebagai pemilik modal sosial paling besar di metropolis ini, seperti NU dan Muhammadiyah, sudah selayaknya berperan aktif membantu mengangkat warga yang menjadi korban dari impitan problem kependudukan-kewarganegaraan ini. Peran advokasi mendesak dilakukan.

Peran titik-titik simpul masyarakat seperti ormas keagamaan tampak besar menyusul lambannya kerja birokrasi pemerintahan kota ini serta mandulnya respons politik kalangan legislatif. Problem stateless society merupakan masalah besar karena menyangkut hak dasar warga negara. Karena itu, yudikatif dan legislatif harus disadarkan kembali pada tugas masing-masing dalam menjamin hak dasar tersebut.

Energi warga metropolis ini harus segera diakumulasikan untuk membantu menyelesaikan problem stateless society. Momen pilwali 2010 yang segera dilaksanakan harus bisa menjadi momentum berharga untuk membenahi database kependudukan kota ini. Problem stateless society menjadi prioritas dalam kerangka reformasi kependudukan di kota metropolis ini. (mik).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id